

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, strategi komunikasi politik Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam menangani isu kebijakan tunjangan kinerja dosen ASN telah memenuhi unsur-unsur dasar komunikasi politik meliputi komunikator, pesan, saluran, dan sasaran komunikasi. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menempatkan diri sebagai komunikator politik yang berupaya menyampaikan informasi, menjelaskan konteks kebijakan, dan menjaga kepercayaan publik melalui pemanfaatan berbagai saluran komunikasi, terutama media sosial Instagram, audiensi, sosialisasi, hingga forum komunikasi langsung. Pesan yang disampaikan juga disusun melalui mekanisme verifikasi dan dikemas dalam format yang lebih mudah dipahami oleh publik.

Disisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa strategi komunikasi politik yang diimplementasikan cenderung merepresentasikan pola komunikasi kelembagaan yang bersifat rutin dibandingkan strategi komunikasi politik yang dirancang secara khusus untuk mengelola krisis kebijakan tunjangan kinerja dosen ASN. Hal tersebut mengakibatkan strategi komunikasi yang diimplementasikan belum optimal dalam membangun penerimaan, pemahaman, dan kepercayaan dosen ASN terhadap kebijakan tunjangan kinerja dosen ASN. Meskipun berhasil menjalankan tujuan informatif dan menjaga arus informasi resmi agar tetap tersedia, komunikasi yang diterapkan cenderung birokratis, normatif, defensif, dan kurangnya dialog sehingga belum mampu menjawab kebutuhan informasi dan aspirasi dosen ASN secara substantif. Hal tersebut mengakibatkan komunikasi yang dilakukan lebih banyak diasumsikan sebagai penyampaian penjelasan administratif daripada upaya membangun kesepahaman dengan kelompok sasaran kebijakan.

Komunikasi politik dalam menangani isu tunjangan kinerja dosen ASN lebih menunjukkan pola komunikasi rutin kelembagaan dibandingkan penerapan strategi komunikasi politik yang secara khusus dirancang menghadapi krisis kebijakan tersebut. Hal tersebut terlihat dari dominannya narasi yang berorientasi pada

penyampaian informasi normatif, tidak ditemukannya perubahan strategi komunikasi politik yang signifikan ketika eskalasi isu meningkat dan minimnya ruang dialog yang dibangun untuk merespon kritik publik. Selain itu, akses terhadap informasi strategis mengenai pengelolaan isu relatif terbatas. Strategi komunikasi khusus penanganan isu tunjangan kinerja tidak menunjukkan adanya perencanaan komunikasi politik yang bersifat spesifik. Hal tersebut mengindikasikan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Kemdikti-saintek berfokus pada penyampaian posisi resmi institusi daripada implementasi strategi komunikasi yang adaptif terhadap dinamika krisis.

Lebih lanjut, strategi komunikasi politik Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menimbulkan implikasi terhadap opini dosen ASN, opini publik, legitimasi institusi, dan citra institusi. Masifnya keterlibatan publik pada media sosial Instagram menunjukkan bahwa komunikasi yang diimplementasikan berhasil menarik atensi publik terhadap isu tunjangan kinerja dosen ASN, tetapi belum sepenuhnya mendapatkan penerimaan positif dari masyarakat. Celah antara ekspektasi dosen ASN dengan pesan yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menimbulkan ketidakpuasan, kritik, dan penurunan kepercayaan terhadap institusi. Alhasil, isu tunjangan kinerja dosen ASN membuktikan bahwa keberhasilan suatu komunikasi politik pemerintah tidak hanya ditentukan pada kemampuan menyebarkan informasi, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan membangun komunikasi yang responsif, transparan, partisipatif, dan empatik. Hal tersebut bertujuan untuk mempertahankan legitimasi dan kepercayaan publik di era ruang digital yang semakin kritis.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Analisis Strategi Komunikasi Politik Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Terkait Studi Kasus Kebijakan Tunjangan Kinerja Dosen ASN”, peneliti memberikan atau mengajukan saran sebagai berikut:

5.2.1. Saran Praktis

Berdasarkan hasil penelitian, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi perlu memperkuat strategi komunikasi politik yang lebih transparan, dialogis, dan responsif dalam menangani isu-isu kebijakan yang berdampak langsung pada kelompok sasaran. Penyampaian informasi kebijakan tidak cukup hanya berfokus pada aspek administratif dan regulatif, tetapi juga perlu menjelaskan alasan, proses pengambilan keputusan, dan perkembangan kebijakan secara terbuka untuk mengurangi ketidakpastian informasi yang berpotensi menimbulkan spekulasi dan ketidakpercayaan publik.

Selain itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi perlu mengoptimalkan fungsi media sosial tidak hanya sebagai sarana distribusi informasi, tetapi juga sebagai ruang komunikasi dua arah yang terjadinya interaksi yang lebih substantif dengan publik. Pengelolaan komunikasi digital perlu didukung oleh mekanisme umpan balik yang jelas, sikap yang lebih cepat terhadap aspirasi publik, keterlibatan komunikator yang memiliki kredibilitas, dan kemampuan menjelaskan kebijakan secara persuasif.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi juga perlu mengedepankan pendekatan komunikasi yang lebih empatik, terutama ketika menghadapi isu yang berkaitan dengan kesejahteraan dan rasa keadilan kelompok sasaran. Komunikasi yang mampu mengakomodasi dimensi emosional dan aspirasi publik akan lebih efektif dalam membangun kepercayaan, menjaga legitimasi institusi, dan mencegah berkembangnya krisis komunikasi di ruang publik digital.

5.2.2. Saran Teoritis

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada analisis strategi komunikasi politik Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam studi kasus kebijakan tunjangan kinerja dosen ASN dengan menggunakan perspektif komunikasi politik, komunikasi kebijakan publik, dan media sosial. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian dari sudut pandang teoritis yang berbeda.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada pengalaman dan pandangan informan tertentu. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk mengukur secara lebih luas tingkat efektivitas komunikasi pemerintah, persepsi publik, tingkat kepercayaan masyarakat, ataupun pengaruh komunikasi digital terhadap penerimaan kebijakan publik.

Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas objek kajian pada kementerian, lembaga pemerintah, atau isu kebijakan publik lainnya yang memicu kontroversi di ruang digital. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu komunikasi politik, terutama terkait strategi komunikasi pemerintah dalam membangun legitimasi, kepercayaan, dan dukungan publik di era digital.